

BAB I

PENDAHULUAN

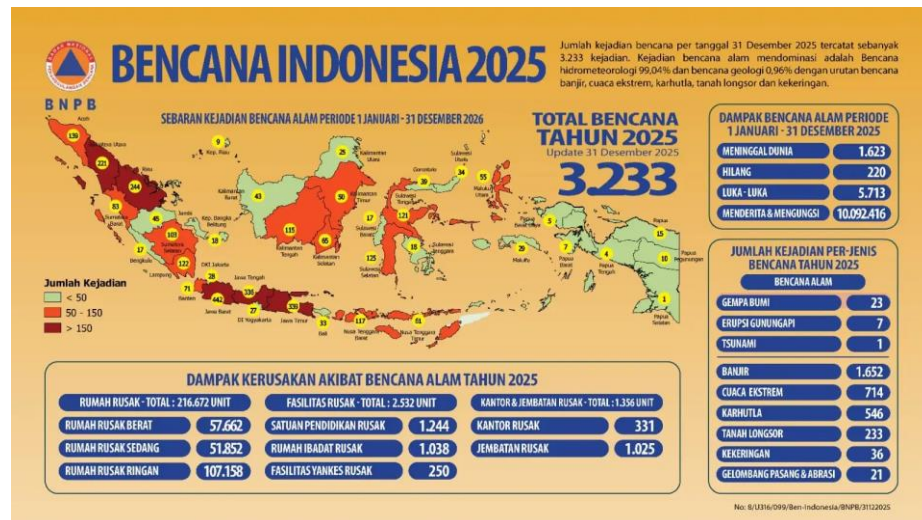
1.1 Latar Belakang

Indonesia setiap tahun kerap dilanda bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan manusia. Sepanjang tahun 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 3.233 kejadian bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia (Pratama, 2025). Rekapitulasi BNPB menyebutkan hampir semua bencana yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025 didominasi oleh bencana hidrometeorologi, seperti banjir, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan. Dari data BNPB (2025) terlihat bahwa fenomena banjir menjadi penyumbang besar pada kasus bencana alam di Indonesia. Tercatat sebanyak 1.652 bencana banjir yang terjadi di berbagai daerah Indonesia.

Perubahan iklim membuat bencana alam menjadi lebih intens dan sering terjadi. Faktor ini yang menjadi masalah semakin sulit, terutama bagi negara-negara yang secara geografis dan geologis rentan terhadap berbagai tantangan lingkungan. Indonesia termasuk di antara negara-negara yang paling rentan terhadap dampak ini karena letaknya yang menguntungkan di antara tiga lempeng tektonik dan wilayah khatulistiwa. Perubahan iklim global menjadi penyebab memburuknya kondisi tersebut dan memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi (Nurhalimah, 2025).

Banjir merupakan fenomena multidimensional yang tidak sekadar masalah lingkungan fisik, tetapi juga persoalan pengelolaan kota dan

pelayanan publik (Laksamana et al., 2025). Pada berbagai kota besar di Indonesia, peningkatan intensitas hujan akibat perubahan iklim serta pertumbuhan urbanisasi telah memperparah risiko banjir, sehingga banjir tidak hanya menjadi peristiwa alam tetapi juga masalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada warga (Akinsanola et al., 2025). Banjir berdampak langsung pada mobilitas, kesehatan, keselamatan, dan kehidupan ekonomi masyarakat urban, sehingga menjadi salah satu indikator daya tahan kota terhadap tantangan sosial dan lingkungan.



Gambar 1. 1 Infografis Bencana Indonesia 2025
Sumber: BNPB (2025)

Selain perubahan iklim global, penyebab terjadinya banjir bisa dipengaruhi oleh adanya urbanisasi. Urbanisasi yang berlangsung cepat di kawasan perkotaan tidak hanya membawa dinamika sosial dan ekonomi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap sistem lingkungan perkotaan, khususnya dalam hal risiko banjir. Proses urbanisasi umumnya mengubah struktur fisik kota melalui konversi lahan terbuka menjadi kawasan terbangun, sehingga permukaan tanah yang sebelumnya perkolatif menjadi tertutup oleh permukaan

kedap air seperti beton, aspal, dan bangunan padat (Błaszczak-Bak et al., 2025).

Jawa Timur mencatat sekitar 46 kejadian banjir, menempatkannya sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kejadian banjir tertinggi secara nasional (Wafa, 2025). Fenomena ini sebagian besar dipicu oleh curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan yang menyebabkan luapan air pada daerah aliran sungai serta wilayah permukiman. Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga terus mengingatkan adanya potensi cuaca ekstrem di wilayah Jawa Timur yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan longsor, akibat dinamika atmosfer dan intensitas hujan yang tinggi (Herlambang, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa banjir bukan lagi fenomena insidental, melainkan permasalahan struktural dan berulang di Jawa Timur, sehingga menuntut perhatian serius pemerintah daerah dalam aspek mitigasi risiko, tata kelola perkotaan, serta peningkatan kapasitas penanganan bencana, termasuk pada wilayah perkotaan besar seperti Kota Surabaya yang memiliki tingkat kerentanan tinggi akibat kepadatan penduduk dan perkembangan urbanisasi yang pesat.

Surabaya secara historis mengalami bencana banjir yang berulang setiap musim penghujan, khususnya di wilayah-wilayah dengan drainase yang rentan tersumbat dan saluran air yang tidak optimal. Upaya penanggulangan banjir di Surabaya masih menghadapi berbagai kendala, meskipun sudah ada kebijakan dan program yang dikeluarkan pemerintah kota untuk menanggulangi masalah

ini. Dalam penelitian Buchori et al. (2025) peningkatan jumlah kejadian banjir dari tahun 2023 ke 2024 menjadi indikasi bahwa penerapan prinsip *good environmental governance* dalam penanggulangan banjir masih perlu diperkuat, utamanya terkait koordinasi kelembagaan dan sumber daya yang terbatas.

Dalam beberapa tahun terakhir, jenis banjir yang paling sering terjadi di Surabaya dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama, yaitu banjir akibat hujan yang menimbulkan genangan di wilayah perkotaan serta banjir rob yang terjadi di kawasan pesisir akibat pasang air laut (Devi, 2025). Banjir rob tercatat beberapa kali terjadi di wilayah pesisir seperti kawasan Kalimas, Perak Barat, hingga Kalianak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjung Perak mencatat bahwa fenomena pasang maksimum air laut dapat mencapai ketinggian sekitar 130–150 sentimeter dari permukaan laut rata-rata sehingga memicu genangan air di sejumlah kawasan pesisir Surabaya (Hasana, 2025).

Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah banjir yang rumit ini. Melalui berbagai kebijakan lingkungan, pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara, mengelola, dan melestarikan lingkungan yang aman dan sehat. Tata kelola lingkungan yang efektif membutuhkan aturan yang ketat di semua tingkatan, dari federal hingga lokal (Buchori et al., 2025). Pemerintah Kota Surabaya sendiri telah merumuskan arah kebijakan penataan ruang melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2025–

2045 yang berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan serta pengendalian pembangunan kota.

Selain itu, penyelesaian masalah banjir ini perlu segera ditangani berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi, pada Bab II Pasal 9 (point a) menyebutkan bahwa banjir termasuk bencana yang harus dilakukan pengkajian resikonya. Selain itu terdapat Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 115 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah tingkat pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mitigasi bahaya banjir, terutama Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur memiliki wewenang dalam penanggulangan banjir.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program penanganan banjir, mulai dari normalisasi saluran drainase, pembangunan rumah pompa, kolam retensi, bozem, hingga revitalisasi sungai dan sistem pengendalian air berbasis teknologi (Amaluddin, 2025). Selain itu, pendekatan nonstruktural seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyusunan regulasi tata ruang juga terus dilakukan. Upaya-upaya tersebut mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengurangi risiko banjir dan meningkatkan ketahanan kota terhadap bencana.

Berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan, namun fenomena banjir di Kota Surabaya masih terus terjadi dan menjadi keluhan publik di sejumlah wilayah. Genangan air yang berlangsung berjam-jam hingga berhari-hari, gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, serta kerugian material yang ditimbulkan menjadi indikator bahwa permasalahan banjir belum sepenuhnya tertangani secara optimal. Wali Kota Surabaya mengungkapkan bahwa masih terdapat 250 titik banjir yang menjadi tugas besar Pemerintah Kota Surabaya (Widiyana, 2026). Pada tahun 2021 sudah tertangani sekitar 100 titik banjir dari total keseluruhan 350 titik (Elaine, 2026). Kondisi ini memunculkan beragam persepsi di kalangan masyarakat terkait efektivitas dan kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani banjir.



Gambar 1. 2 Upaya penanganan Banjir oleh Walikota Surabaya
Sumber: Widiyana (2025) by detikJatim

Pembangunan infrastruktur, termasuk pengendalian banjir dan perbaikan jalan, merupakan bagian dari daftar program prioritas Pemerintah Kota Surabaya untuk tahun 2025, menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

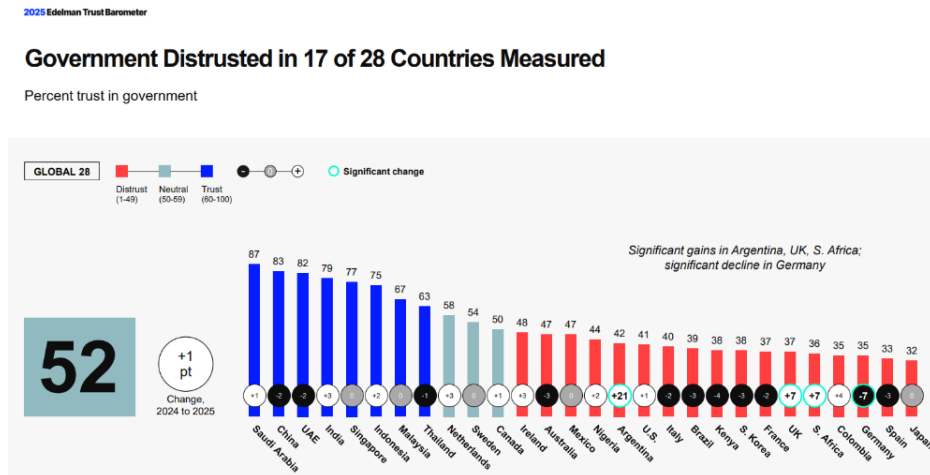
Daerah (RPJMD) Surabaya 2021–2026 (Pemkot Surabaya, 2025b). Bahkan pada tahun 2025, Pemerintah Kota Surabaya menaikkan alokasi APBD untuk mengatasi masalah banjir ini sebesar 1,4 triliun rupiah (Elaiena, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah mengupayakan berbagai cara untuk bisa menangani *problem* banjir ini sesuai skala prioritas yang ditentukan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah memiliki implikasi yang sangat penting terhadap tingkat kepercayaan publik (*public trust*). *Public trust* merupakan salah satu modal sosial utama dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, karena mencerminkan sejauh mana masyarakat percaya bahwa pemerintah mampu, kompeten, dan beritikad baik dalam menjalankan fungsi-fungsinya (Ferdinand, 2024). Tingkat kepercayaan publik yang tinggi dapat memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam program-program pemerintah. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan publik berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan dan menimbulkan resistensi sosial.

Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan pemerintahan di era modern. Menurut Ferdinand (2024) Kebijakan pemerintah dan penyampaian layanan publik akan sangat berpengaruh signifikan apabila didukung dengan kepercayaan publik. Secara umum, kepercayaan masyarakat menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah dianggap kompeten, adil, dan bertanggung jawab

dalam menjalankan fungsi pelayanan maupun penegakan aturan (OECD, 2025). Masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang besar terhadap pemerintah apabila pemerintah dapat dipercaya dan mempunyai etika birokrasi yang baik. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi akan lebih patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan, mendukung penuh inisiatif pemerintah, dan yakin terhadap kemampuan pemerintah dalam memperluas partisipasi publik (Haning et al., 2020). Sebaliknya, rendahnya kepercayaan publik dapat menimbulkan resistensi, konflik, hingga delegitimasi terhadap aparat dan kebijakan publik.

Dalam dua dekade terakhir, tren kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah di berbagai negara menunjukkan pola yang berfluktuasi. Laporan *Edelman Trust Barometer Global (2023)* mencatat bahwa terjadi penurunan kepercayaan pada lembaga pemerintahan di banyak negara akibat maraknya misinformasi, polarisasi, serta persepsi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Meskipun Indonesia relatif stabil, kepercayaan masyarakat tetap dipengaruhi oleh kualitas interaksi langsung antara pemerintah dan warga dalam proses pelayanan maupun penegakan aturan. Namun, data *Edelman Trust Barometer Global (2025)* menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2% dari tahun sebelumnya.



Gambar 1. 3 Kenaikan Tingkat Kepercayaan Publik Secara Global
Sumber: Endelman Trust Barometer Global (2025)

Hal ini mempertegas bahwa *public trust* tidak hanya bergantung pada kebijakan makro, tetapi juga pada pengalaman konkret masyarakat dalam berhadapan dengan aparat pemerintah di tingkat lokal. Dalam penelitian yang dilakukan Mufti et al. (2020) menerangkan bahwa tingkat partisipasi atau keterlibatan publik yang tinggi akan muncul dari tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Implementasi kebijakan publik yang efektif akan dihasilkan dari tingkat partisipasi publik yang tinggi.

Dalam isu penanganan banjir, *public trust* menjadi faktor krusial karena keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas teknis pemerintah, tetapi juga oleh dukungan dan keterlibatan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap kinerja pemerintah, maka berbagai program penanganan banjir, termasuk kebijakan relokasi, normalisasi sungai, atau pengelolaan drainase, berpotensi menghadapi penolakan atau kurangnya partisipasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika *public trust* dalam penanganan banjir menjadi

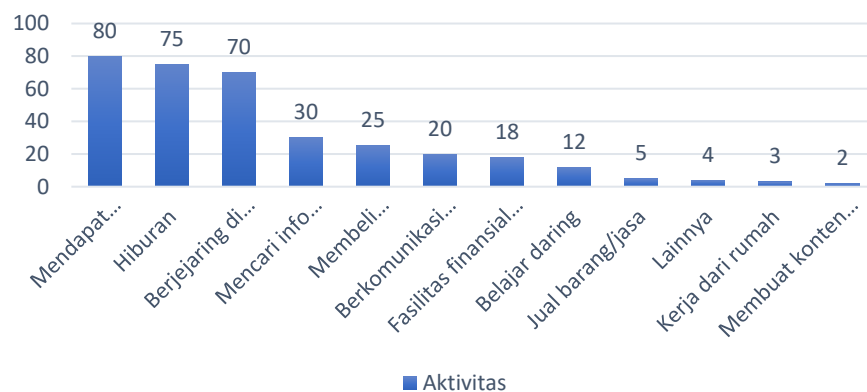
sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pembentukan kepercayaan publik tidak lagi hanya terjadi melalui interaksi langsung, melainkan juga berlangsung secara intensif di ruang digital, khususnya melalui media sosial dan media daring. Penelitian Maulan & Fitriani (2025) menunjukkan bahwa kepercayaan publik timbul karena adanya keterbukaan informasi melalui platform digital. Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara individu berkomunikasi, memperoleh informasi, dan membentuk opini tentang isu-isu publik. Saat ini, media sosial berfungsi sebagai platform untuk wacana publik yang dapat mempengaruhi keputusan politik, sosial, dan ekonomi, selain sebagai alat untuk komunikasi personal (Padila, 2025). Situs media sosial seperti Facebook, Twitter (X), Instagram, dan TikTok memungkinkan informasi untuk menyebar dengan cepat, secara interaktif, dan kepada khalayak luas. Pergerakan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam komunikasi, karena informasi disebarluaskan secara luas kepada setiap pengguna individu, tidak hanya dikendalikan oleh media arus utama.

Setiap orang dapat mengekspresikan pemikiran mereka, terlibat dalam debat, dan berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia melalui media sosial. Melalui proses ini, tercipta ruang publik digital yang inklusif, memberikan kesempatan kepada suara-suara yang sebelumnya kurang terwakili untuk didengar (Amir et al., 2024). Media sosial terbukti menjadi arena pembentukan dan konstruksi opini masyarakat terkait isu-isu publik,

termasuk kebijakan pemerintah. Interaksi di platform digital menciptakan wacana publik yang dapat memperkuat atau justru memecah persepsi masyarakat tentang sebuah kebijakan. Faktor-faktor seperti algoritma platform, intensitas interaksi, dan kualitas informasi yang tersebar memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana opini tersebut terbentuk dan berkembang (Wahyuni, 2025)

Data statistik menunjukkan relevansi kuat ruang digital di Indonesia. Hingga awal tahun 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia diperkirakan mencapai 212 juta orang, dengan penetrasi internet mencapai sekitar 74,6% dari total populasi, sementara jumlah pengguna aktif media sosial mencapai lebih dari 143 juta orang atau sekitar 50,2% dari total penduduk (Hidayat et al., 2025).



Gambar 1.4 Aktivitas Berinternet Warga Surabaya
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (2023)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2023), untuk Provinsi Jawa Timur, 84,6% penduduk Surabaya umumnya mengakses internet untuk informasi atau berita. Kedua, 78,6% penduduk Surabaya menggunakan

internet untuk tujuan hiburan. Selain itu, 76% menggunakan internet untuk berjejaring di media sosial.

Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga Kota Surabaya terhubung secara digital dan memanfaatkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pada administrasi publik, media digital tidak hanya memengaruhi opini publik, tetapi juga kepercayaan publik (*public trust*) terhadap pemerintahan maupun lembaga negara. Penggunaan media sosial oleh institusi pemerintah untuk menyampaikan kebijakan publik secara cepat dan transparan berpotensi meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap interaksi masyarakat pada media sosial Instagram, khususnya pada kolom komentar akun resmi pemerintah dan informasi Kota Surabaya seperti akun @surabaya, terlihat adanya dinamika persepsi publik terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan banjir. Pada beberapa unggahan yang membahas kejadian banjir dan upaya penanganannya, masyarakat menunjukkan beragam respons yang mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang fluktuatif.



Gambar 1. 4 *Capture* respon masyarakat di Instagram @surabaya
Sumber: Instagram @surabaya, (2026)

Terdapat kecenderungan masyarakat memberikan komentar bernada kritik yang menyoroti masih terjadinya genangan berulang, kurang optimalnya sistem drainase atau gorong-gorong, lambatnya penanganan di beberapa wilayah tertentu, serta narasi media sosial pemerintah yang dianggap tidak tepat. Namun, masih ada yang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah berusaha menanggulangi banjir di Kota Surabaya. Variasi respons tersebut memperlihatkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang diskursif publik yang menggambarkan persepsi masyarakat secara langsung terhadap kinerja pemerintah, sekaligus menjadi indikator awal *public trust* dalam penanganan bencana perkotaan.

Namun demikian, ruang digital juga memiliki sisi yang kompleks. Selain menjadi medium untuk menyebarkan informasi dan membangun keterlibatan publik, media sosial dapat menghadirkan tantangan berupa disinformasi, misinformasi, serta polarisasi opini yang dapat menimbulkan konflik persepsi dan memengaruhi tingkat kepercayaan publik secara negatif (Darmansyah, 2024). Penyebaran konten yang tidak akurat atau bias dapat membentuk opini yang salah dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk memahami dinamika ruang digital sebagai arena pembentukan opini dan trust publik menjadi semakin penting dalam penelitian administrasi publik kontemporer.

Dalam transparansi kinerja Pemerintah Kota Surabaya, penggunaan ruang digital sangat relevan karena setiap tindakan dari sebuah kebijakan berpotensi menjadi perbincangan dan sorotan di media sosial. Dalam hal ini, citra dan reputasi institusi dipengaruhi tidak hanya oleh praktik implementasi kebijakan secara langsung, tetapi juga oleh cara narasi tindakan tersebut dikonstruksi dan dipertukarkan dalam jaringan komunikasi digital. Oleh sebab itu, pemahaman tentang bagaimana ruang digital berfungsi sebagai arena pembentukan opini dan kepercayaan publik merupakan landasan penting dalam menganalisis *public trust* terhadap kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani bencana banjir ini. Namun demikian, dinamika opini publik yang terbentuk melalui interaksi kompleks antaraktor di ruang digital sering kali belum sepenuhnya mampu dijelaskan oleh pendekatan penelitian konvensional yang bersifat survei atau deskriptif.

Dalam mengkaji tingkat *public trust* masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Surabaya, penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* yang mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui analisis deskriptif guna memahami secara mendalam narasi, persepsi, serta pengalaman masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menangani isu publik, khususnya fenomena banjir yang menjadi perhatian warga Kota Surabaya. Analisis ini memungkinkan peneliti menangkap makna di balik komentar, opini, serta dinamika komunikasi publik yang berkembang di ruang digital.

Sementara itu, pendekatan kuantitatif memanfaatkan big data media sosial dengan metode *Social Network Analysis* (SNA) untuk memetakan pola interaksi, struktur jaringan komunikasi, aktor dominan, serta persebaran sentimen publik terhadap kebijakan dan respons pemerintah. Integrasi kedua metode tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang tidak hanya mendalam secara interpretatif, tetapi juga kuat secara empiris melalui data berskala besar, sehingga mampu menjelaskan secara lebih utuh bagaimana tingkat kepercayaan publik terbentuk, dipengaruhi, dan direpresentasikan dalam diskursus digital mengenai kinerja Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian tersebut, terindikasi bahwa penanganan banjir di Kota Surabaya bukan hanya persoalan teknis dan kebijakan, tetapi juga persoalan sosial yang berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan

untuk dilakukan guna menganalisis *public trust* terhadap kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan banjir di Kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah penelitian tersebut, rumusan masalah yang akan dijawab oleh peneliti adalah bagaimana *Public Trust* Mengenai Kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam Penanganan Banjir di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana *public trust* mengenai kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan banjir di Kota Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam memahami konsep *public trust* (kepercayaan publik) sebagai variabel penting dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui analisis dinamika *public trust* terhadap kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan banjir, penelitian ini memperkaya pemahaman bahwa kepercayaan publik tidak bersifat statis, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat terhadap kinerja pemerintah, kualitas pelayanan publik, serta efektivitas kebijakan yang diimplementasikan.

- b. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam menjelaskan hubungan timbal balik antara *public trust* dan kinerja pemerintah daerah. Tidak hanya kinerja pemerintah yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, tetapi *public trust* juga dapat memengaruhi legitimasi kebijakan, kepatuhan masyarakat, dan keberhasilan implementasi program penanganan banjir. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat perspektif bahwa *public trust* merupakan elemen strategis dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Penelitian ini memberikan bukti empiris atas penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, dan partisipasi publik dalam penanganan banjir di wilayah perkotaan. Temuan penelitian ini diharapkan mampu memperjelas bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut berkontribusi terhadap pembentukan dan dinamika *public trust* masyarakat terhadap pemerintah kota.
- d. Penelitian ini memperkaya literatur akademik terkait kebijakan publik dan manajemen bencana, khususnya bencana hidrometeorologi di perkotaan. Dengan mengaitkan aspek teknis penanganan banjir dan aspek sosial berupa kepercayaan publik, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih komprehensif dalam menilai keberhasilan kebijakan penanganan banjir.

1.4.1 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Penelitian ini memberikan masukan strategis bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengevaluasi kinerja penanganan banjir, tidak hanya dari aspek teknis dan administratif, tetapi juga dari aspek sosial berupa tingkat kepercayaan masyarakat. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan komunikasi dan transparansi pemerintah kepada masyarakat terdampak banjir.

b. Bagi Perangkat Daerah Terkait

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti dinas pekerjaan umum, dinas lingkungan hidup, dan BPBD, dalam meningkatkan koordinasi, responsivitas, dan efektivitas program penanganan banjir, sehingga mampu meningkatkan persepsi positif dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

c. Bagi Masyarakat Kota Surabaya

Penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintah dalam penanganan banjir serta faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya kepercayaan publik. Dengan demikian, masyarakat diharapkan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam program pengendalian banjir, menjaga

infrastruktur lingkungan, serta membangun hubungan kolaboratif dengan pemerintah.

d. Bagi Pengambil Kebijakan dan Perencana Pembangunan Daerah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan penanganan banjir yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan teknis, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan kepercayaan publik dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan.

e. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi, bahan pembelajaran, dan perbandingan bagi akademisi maupun mahasiswa yang meneliti isu serupa di bidang administrasi publik, kebijakan publik, dan manajemen bencana, khususnya yang berkaitan dengan public trust dan kinerja pemerintah daerah.